

Hari/Tanggal: Selasa, 11 Juli 2023

Pukul: 11.00 Wita-Selesai

Tempat: Ruang Rapat. Departemen Ilmu Sejarah

**SEJARAH KOTA MAJENE:  
DARI TANGSI MILITER MENJADI IBU KOTA *AFDEELING* MANDAR  
TAHUN 1905-1942**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Hasanuddin

**Disusun Oleh :**

**Muhammad Darwan**

**NIM. F061181307**

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**SEJARAH KOTA MAJENE: DARI TANGSI MILITER MENJADI IBU  
KOTA *AFDEELING* MANDAR TAHUN 1905-1942**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD DARWAN**

**F061181307**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 11 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Dr. Ilham, S.S., M.Hum  
NIP. 197608272008014011

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum  
NIP. 1978112 0200812 2 002

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akin Duli, M.A  
NIP. 19640716 199103 1 010

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah  
Universitas Hasanuddin**

Dr. Ilham, S.S., M.Hum  
NIP. 197608272008011011

**HALAMAN PENERIMAAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Selasa, 11 Juli 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**SEJARAH KOTA MAJENE: DARI TANGSI MILITER MENJADI IBU  
KOTA AFDEELING MANDAR TAHUN 1905-1942**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 Juli 2023



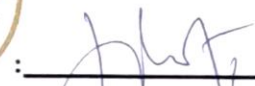
1. Dr. Ilham, S.S, M.Hum

Ketua



2. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum

Sekretaris



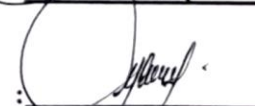
3. Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A

Penguji I



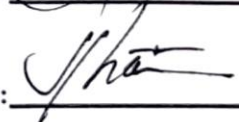
4. Nasihin, S.S., M.A

Penguji II



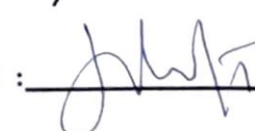
5. Dr. Ilham, S.S, M.Hum

Konsultan I



6. Dr. Ida Liana Tanjung, M. Hum

Konsultan II



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Darwan

NIM : F061181307

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah/Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**SEJARAH KOTA MAJENE: DARI TANGSI MILITER MENJADI IBU  
KOTA AFDEELING MANDAR TAHUN 1905-1942**

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di Universitas Hasanuddin. Kepenulisan ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik, dan semua sumber yang digunakan dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat di dalamnya unsur-unsur plagiarisme dan dapat dibuktikan metode sejarahnya, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 6 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Muhammad Darwan

## KATA PENGANTAR

Penulis memohon ampun kepada Allah SWT. kemudian memanjatkan segala puji bagi-Nya. Penulis juga senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi yang telah membawa umat manusia menuju alam ilmu pengetahuan. Penulis bersyukur kepada Tuhan dengan segala nikmat kehidupan yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini dengan judul **Sejarah Kota Majene: Dari Tangsi Militer Menjadi Ibu Kota *Afdeeling* Mandar Tahun 1905-1942.**

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak tantangan. Namun, karena bantuan dari berbagai pihak penulis dapat melalui kendala-kendala tersebut. Adanya kendala yang dihadapi dalam proses pengerjaan skripsi ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi penulis. Melalui proses tersebut penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran dalam menyusun sebuah karya berupa skripsi untuk mencapai gelar sarjana. Mulai dari pengalaman pengumpulan sumber sejarah hingga pada penulisan sejarah.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Keterlibatan mereka merupakan sebuah pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, ucapan terima kasih tersebut penulis ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, **Syarifuddin** dan **Salmiah, S.Pd.** Mereka merupakan orang yang telah membimbing penulis selama ini dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Segala bentuk kebutuhan penulis, baik secara materil

maupun semangat dalam menempuh jenjang pendidikan. Kedua orang tua penulis merupakan teman diskusi tentang segala hal terutama persoalan yang penulis hadapi selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Karya ini juga saya persembahkan untuk mereka berdua dan semoga mereka bangga dengan pencapaian ini.

2. Dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yaitu **Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum, Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M.Hum, Dr. Bambang Sulistiyo Edy P, M.S, Dr. Nahdia Nur, M.Hum, Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum, Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S, Dr. Muslimin AR. Effendi, M.A, Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag, Amrullah Amir S.S., M.A., Ph.D, Nasihin, S.S., M.A, Dr. Ilham, S.S., M.Hum** (Ketua Departemen), **A. Lili Evita, S.S., M.Hum** (Pembimbing Akademik), **(Alm) Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A, dan (Almh) Margriet Moka Lappia, S.S., M.S.** Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Departemen Ilmu Sejarah.
3. Dosen pembimbing skripsi, yaitu **Dr. Ilham, S.S., M.Hum** (Pembimbing I) dan **Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum** (Pembimbing II) yang telah memberikan banyak kritik dan saran selama penulis menyusun skripsi. Hal tersebut terus menjadi pembelajaran bagi penulis terutama dalam melakukan penelitian sejarah. Selain itu penulis juga banyak dibantu dalam mendapatkan literatur yang dapat menunjang penulisan skripsi.
4. Keluarga Besar HUMANIS KMFIB-UH yang telah membersamai penulis selama menjadi bagian dari keluarga HUMANIS KMFIB-UH. Banyak pengalaman mengenai keorganisasian dan juga menjadi keluarga yang

selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin. Semua pengalaman yang baik dan buruk akan menjadi pelajaran bagi penulis untuk kedepannya.

5. Pengurus BEM KMFIB-UH Periode 2022-2023 yang telah memberikan pengalaman organisasi mahasiswa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) yang telah menjadi ruang belajar dan kekeluargaan selama menjalani hidup di Kota Makassar.

Makassar, 6 Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENERIMAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR ISTILAH .....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Batasan Masalah .....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Tinjauan Pustaka.....	6
1.6.1. Penelitian yang Relevan.....	6
1.6.2. Landasan Konseptual .....	9
1.7. Metode Penelitian.....	12
1.7.1. Pengumpulan Sumber .....	12
1.7.2. Kritik Sumber .....	14
1.7.3. Interpretasi .....	14
1.7.4. Penulisan Sejarah.....	15



1.8. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PERLUASAN EKSPANSI KOLONIAL BELANDA DI MAJENE</b>	
TAHUN 1905-1908 .....	17
2.1. Kondisi Geografis Majene.....	17
2.2. Majene Pada Masa Prakolonial .....	19
2.2.1. Asal Usul Kerajaan Banggae .....	19
2.2.2. Asal Usul Majene.....	22
2.2.3. Kondisi Masyarakat Kerajaan Banggae.....	24
2.3. Majene Pada Masa Kolonial.....	26
2.3.1. Masuknya Belanda di Kerajaan Banggae .....	26
2.3.2. Ekspedisi Militer Belanda di Mandar .....	27
2.3.3. Penaklukan Mandar .....	30
<b>BAB III PERUBAHAN TATA RUANG KOTA MAJENE TAHUN 1905-1942</b>	<b>34</b>
3.1. Tata Ruang Majene Prakolonial .....	34
3.2. Tata Ruang Majene Masa Kolonial.....	42
<b>BAB IV PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA KOLONIAL</b>	
<i>ONDERAFDEELING</i> MAJENE 1905-1942 .....	52
4.1. Jaringan Jalan .....	52
4.2. Tangsi Militer .....	56
4.3. Perkantoran.....	59
4.3.1. Kantor Asisten Residen .....	60
4.3.2. Kantor Pos.....	61
4.4. Rumah Asisten Residen.....	63
4.5. Rumah Dinas Dokter .....	65
4.6. Sekolah .....	66
4.7. Rumah Sakit .....	68
4.8. Jaringan Air Minum.....	71
<b>BAB V SIMPULAN DAN PENUTUP.....</b>	<b>75</b>

DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Majene .....	18
Gambar 3. 1 Peta Kerajaan Banggae 1759.....	35
Gambar 3. 2 Sketsa Pusat Kerajaa Banggae di Salabose.....	37
Gambar 3. 3 Foto Masjid Syekh Abdul Mannan Salabose .....	39
Gambar 3. 4 Tata Ruang Majene Prakolonial.....	41
Gambar 3. 5 Peta Majene Tahun 1934.....	46
Gambar 3. 6 Peta Tata Ruang Prakolonial dan Kolonial Majene .....	48
Gambar 4. 1 Foto Jalan di Pesisir Pantai Majene Tahun 1911 .....	54
Gambar 4. 2 Foto Jalan di Pesisir Pantai Majene Tahun 1911 .....	55
Gambar 4. 3 Tangsi Militer Belanda (Asrama Yonif 721 Makkasau).....	58
Gambar 4. 4 Kantor Asisten Residen <i>Afdeeling</i> Mandar .....	60
Gambar 4. 5 Kantor Pos Majene .....	62
Gambar 4. 6 Halaman Depan Rumah Asisten Residen Mandar Tahun 1911 .....	63
Gambar 4. 7 Rumah Asisten Residen <i>Afdeeling</i> Mandar .....	64
Gambar 4. 8 Rumah Dinas Dokter .....	65
Gambar 4. 9 Rumah Sakit Kolonial .....	69
Gambar 4. 10 Rumah Sakit Kolonial .....	70
Gambar 4. 11 Museum Mandar .....	71
Gambar 4. 12 Air Terjun Abaga .....	73
Gambar 4. 13 PDAM Abaga, Majene .....	74

## DAFTAR ISTILAH

- Afdeeling* : Wilayah administratif diperintah oleh seorang Asisten Residen, atau setingkat dengan kabupaten.
- Onderafdeeling* : Wilayah administratif diperintah oleh seorang wedana yang disebut kontrolir.
- Mara'dia* : Pemimpin tertinggi kerajaan di Mandar.
- Tomakaka* : Kepala kampung yang dianggap mampu mengayomi masyarakat.
- Korte Verklaring* : Perjanjian pendek

## ABSTRAK

**Muhammad Darwan, F061181307, “Sejarah Kota Majene: Dari Tangsi Militer Menjadi Ibu Kota *Afdeeling* Mandar Tahun 1905-1942”, dibimbing oleh Dr. Ilham, S.S., M.Hum dan Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum.**

Penelitian ini mengkaji tentang perluasan ekspansi Kolonial Belanda di Majene, perubahan tata ruang Majene setelah menjadi Ibu Kota *Afdeeling* Mandar, dan pembangunan infrastruktur kota yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode ini dimulai dari penelusuran sumber tulisan berupa arsip, dokumen, foto, artikel, majalah, buku dan jurnal dari penelusuran arsip dan pustaka. Sumber tulisan tersebut diperoleh dari Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan, KITLV, *Delpher*, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, dan jurnal online. Setelah melakukan penelusuran sumber dilanjutkan dengan kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah.

Hasil dari penelitian ini adalah perluasan ekspansi Kolonial Belanda di Majene pada tahun 1905-1908 dilakukan melalui ekspedisi militer yang dimulai pada tahun 1905. Ekspedisi militer tersebut mendapatkan perlawanan dari masyarakat Majene sehingga memakan korban dari kedua pihak. Namun, pihak Kolonial Belanda berhasil menguasai Majene pada tahun 1908 dengan ditangkapnya I Calo Ammana Wewang kemudian diasingkan ke Belitung. Keberadaan pemerintah kolonial di Majene menyebabkan perubahan pada tata ruang kota prakolonial menjadi tata ruang kota kolonial. Pemerintah kolonial melakukan pemindahan pusat kota yang awalnya berada di Salabose ke Pangali-ali yang berada di sekitar Pelabuhan Majene. Pemindahan tersebut menjadi titik awal perkembangan tata ruang di sekitar pusat kota kolonial, seperti munculnya kawasan perkantoran, permukiman dengan segregasi ras terutama permukiman orang Eropa, jaringan jalan yang dibuat membentuk petak-petak, serta pasar dan pelabuhan sebagai pusat perekonomian. Perubahan wujud struktural Majene dapat dilihat secara fisik pembangunan infrastruktur kota seperti jaringan jalan, tangsi militer, kantor *asisten residen*, rumah sakit, sekolah, kantor pos, rumah dinas *asisten residen* Mandar, rumah dinas dokter, rumah pegawai kolonial, pelabuhan, dan jaringan air minum. Pembangunan infrastruktur kota terus dikakukan oleh pemerintah kolonial selama berkuasa di Majene. Infrastruktur yang dibangun seperti jaringan jalan, tangsi militer, kantor *asisten residen*, rumah dinas *asisten residen*, rumah dinas dokter, sekolah, rumah sakit, permukiman orang Eropa, dan jaringan air minum.

**Kata Kunci :** Majene, Ibu kota *afdeeling*, Tata ruang kota, Kolonial

## ABSTRACT

**Muhammad Darwan, F061181307, "History of Majene City: From Military Prison to Afdeeling Mandar Capital in 1905-1942", supervised by Dr. Ilham, S.S., M.Hum and Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum.**

This research examines the extent of Dutch colonial expansion in Majene, changes in Majene's spatial layout after it became the capital of Afdeeling Mandar, and the development of city infrastructure built by the Dutch Colonial Government.

The method used in this research is the historical research method. This method starts from searching written sources in the form of archives, documents, photos, articles, magazines, books and journals from searching archives and libraries. The sources for this article were obtained from the South Sulawesi Regional Archives and Library Agency, KITLV, Delpher, Hasanuddin University Library, and online journals. After searching for sources, it continues with source criticism, interpretation and historical writing.

The results of this research are that the Dutch colonial expansion in Majene in 1905-1908 was carried out through a military expedition which began in 1905. The military expedition met resistance from the people of Majene, resulting in casualties from both parties. However, the Dutch Colonial managed to control Majene in 1908 with the arrest of I Calo Ammana Wewang and then exiled to Belitung. The presence of the colonial government in Majene caused a change in the pre-colonial city layout to a colonial city layout. The colonial government moved the city center from Salabose to Pangali-ali which was around Majene Harbor. This transfer was the starting point for the development of spatial planning around the colonial city center, such as the emergence of office areas, residential areas with racial segregation, especially European settlements, a network of roads created to form squares, as well as markets and ports as economic centers. Changes in the structural form of Majene can be seen physically in the development of city infrastructure such as road connecting, military barracks, resident assistant offices, hospitals, schools, post offices, Mandar resident assistant official residences, doctors' official residences, colonial servants' houses, ports, and drinking water networks. . The development of city infrastructure continued to be carried out by the colonial government during its rule in Majene. Infrastructure built includes road networks, military barracks, resident assistant offices, resident assistant official residences, doctors' official residences, schools, hospitals, European settlements, and drinking water connecting.

**Keywords:** Majene, Capital of *afdeeling*, City layout, Colonial

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Majene adalah sebuah daerah yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sulawesi. Majene berada di pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan teluk Mandar dan Selat Makassar. Secara administrasi Majene adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Letak kabupaten ini persis di tengah Provinsi Sulawesi Barat, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota provinsi, di selatan berbatasan dengan Polewali Mandar, di timur berbatasan dengan Mamasa, dan di barat berbatasan langsung dengan selat Makassar.<sup>1</sup>

Sebelum menjadi sebuah kabupaten, ada dua periode kekuasaan pemerintahan di Majene. Pertama, sebelum tahun 1905, Majene berada di bawah kekuasaan pemerintahan Kerajaan Banggae. Kerajaan Banggae merupakan salah satu kerajaan dari 14 kerajaan yang ada di Mandar. 14 kerajaan tersebut tersebar di seluruh wilayah Mandar yang terbagi menjadi dua konfederasi, yaitu *Pitu Ba'bana Binanga* (tujuh kerajaan di pantai) dan *Pitu Ulunna Salu* (tujuh kerajaan di hulu sungai).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suradi Yasil. dkk, *Warisan Salabose Sejarah dan Tradisi Maulid*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 2.

<sup>2</sup> Abd. Shadiq Kawu, "Sejarah Masuknya Islam di Majene", *Jurnal Al-Qalam Vol. 17. No. 2, 2011*, hlm. 154.

Kedua, pada tahun 1905 Mandar mulai dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Ekspedisi Militer Belanda tahun 1905-1907. Ekspedisi militer yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda merupakan upaya untuk menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda secara langsung. Hal itu dilakukan untuk memperkuat posisi mereka di Hindia Belanda dan melancarkan aktivitas perekonomian seperti penarikan pajak.<sup>3</sup>

Ekspedisi Militer yang dilancarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Mandar mendapatkan perlawanan dari masyarakat Mandar. Namun, pada tahun 1908 wilayah Mandar takluk sepenuhnya kepada Belanda. Hal ini ditandai dengan ditangkanya I Calo Ammana I Wewang yang kemudian diasingkan ke Belitung.<sup>4</sup> Ditangkanya I Calo Ammana I Wewang oleh Tentara Belanda menjadi titik awal kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Mandar.

Selama melakukan Ekspedisi Militer di Mandar, Belanda menempatkan pusat komando militernya di Majene. Kemudian setelah Belanda menguasai Mandar maka *Onderafdeeling* Majene dipilih menjadi Ibu Kota *Afdeeling* Mandar. *Onderafdeeling* Majene dipilih menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda di *Afdeeling* Mandar karena letaknya yang strategis. Daerah ini terletak persis di tengah-tengah wilayah Mandar dan juga memiliki pelabuhan alami sebagai tempat berlabuh kapal-kapal Belanda yang memudahkan transportasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Amir, *Penataan Mandar Masa Kolonial Belanda 1905-1942*, (Makassar: Arus Timur, 2016), hlm. 42.

<sup>4</sup> Abdul Karim, "Ekspedisi Militer Belanda di Mandar 1905-1907", *Handep, Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 209.



Ketika Majene berstatus sebagai ibu kota *Afdeeling* Mandar, terjadi perubahan tata ruang kota secara bertahap. Sebelum mejadi pusat pemerintahan kolonial, tata ruang Majene masih bersifat tradisional. Tata ruang tradisional Majene masih berupa perkampungan pribumi. Pusat pemerintahan tradisional Majene terletak di daerah perbukitan dekat dengan pesisir pantai bernama Salabose.

Setelah Pemerintah Hindia Belanda menguatkan posisinya di Mandar, pemerintah kolonial melakukan pengamanan kondisi politik.<sup>6</sup> Setelah itu pemerintah kolonial melakukan penataan struktur pemerintahan dan melakukan perancangan tata ruang kota. Penataan ruang kota yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Majene kemudian mempengaruhi tata ruang kota tradisional Kerajaan Banggae. Pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan infrastruktur kota kolonial seperti pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan juga fasilitas umum lainnya.

Penataan ruang kota kolonial juga terlihat pada permukiman penduduk. Permukiman penduduk semakin beragam setelah masuknya orang-orang Eropa di Majene. Permukiman yang awalnya berupa kampung-kampung menjadi permukiman dengan gaya khas daerah kolonial. Permukiman penduduk di Majene oleh pemerintah Hindia Belanda dibagi berdasarkan etnik. Pembagian permukiman

---

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan Alimuddin, *Majene Kota Tua Pelestarian dan Potensi Kepariwisata*, (Polewali Mandar : Teluk Mandar Kreatif dan Dinas Pariwisata Sulawesi Barat, 2020), hlm. 78.

<sup>6</sup> Muhammad Amir, *Op., Cit*, hlm. 42.

berdasarkan segregasi ras merupakan salah satu ciri khas permukiman kota kolonial di Hindia Belanda.<sup>7</sup>

Setelah kedudukan pemerintah kolonial semakin menguat di Mandar, Belanda kemudian melakukan perancangan dan pembangunan beberapa infrastruktur kolonial berupa, pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, pasar, tangsi militer, fasilitas kesehatan, dan permukiman Eropa. Pembangunan infrastruktur kolonial ini kemudian mengubah tata ruang kota tradisional Majene menjadi tata ruang kota kolonial.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas mengenai alasan Pemerintah Kolonial memilih Majene sebagai ibu kota pemerintahan. Selain itu, akan dibahas juga mengenai perubahan tata ruang kota tradisional menjadi tata ruang Kota Kolonial Majene serta pembangunan infrastruktur kota kolonial.

Tata ruang Kota Majene setelah menjadi pusat pemerintahan kolonial mirip dengan penataan kota-kota kolonial lainnya di Hindia Belanda. Pembangunan infrastruktur kolonial kemudian juga dilakukan di Majene. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan untuk menunjang aktivitas pemerintah kolonial selama berada di *Afdeeling* Mandar.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka berikut ini akan diuraikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini :

1. Bagaimana perluasan ekspansi Kolonial Belanda di Majene?

---

<sup>7</sup> Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 74.

2. Bagaimana perubahan tata ruang Majene setelah menjadi Ibu Kota *Afdeeling* Mandar?
3. Bagaimana pembangunan infrastruktur kota yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda di Majene?

### **1.3. Batasan Masalah**

Batasan temporal penelitian ini mengambil periode antara tahun 1905 sampai tahun 1942. Tahun 1905 dipilih menjadi awal pembahasan karena pada periode ini Mandar mulai ditaklukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui ekspedisi militer pada tahun 1905-1907. Kemudian batas periode dipilih tahun 1942 merupakan batas pemerintahan kolonial Belanda di Mandar, karena sejak tahun 1942 pemerintah Kolonial Belanda digantikan oleh Jepang.

Batas spasial yang diambil dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Majene khususnya di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur. Majene dijadikan sebagai lokasi penelitian karena Majene merupakan Ibu Kota *Afdeeling* Mandar pada masa pemerintahan Kolonial Belanda.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perluasan ekspansi Kolonial Belanda di Majene.
2. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada tata ruang Majene setelah menjadi Ibu Kota *Afdeeling* Mandar.
3. Untuk mengetahui proses pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda di Majene.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai salah satu sumber referensi tentang Sejarah Kota Kolonial Majene.
2. Sebagai salah rujukan bagi pemerintah Kabupaten Majene untuk mengembangkan pariwisata sejarah.

### **1.6. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema penelitian ini. Tinjauan pustaka sebagai sumber referensi dalam menyusun penelitian ini dan tinjauan pustaka juga berisi landasan konseptual yang mengemukakan berbagai konsep dan teori yang dapat menunjang penyusunan penelitian.

#### **1.6.1. Penelitian yang Relevan**

Tulisan dengan tema Kota Kolonial Majene tidak banyak ditemukan. Hal ini dikarenakan penelitian dengan tema sejarah kota khususnya di Kabupaten Majene belum banyak dilakukan. Salah satu buku yang menulis tema tersebut adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Alimuddin dengan judul “Majene Kota Tua Pelestarian dan Potensi Pariwisata”. Ridwan Alimuddin menuliskan tentang asal usul kata Majene, perlawanan masyarakat Mandar terhadap Belanda dan juga menarasikan beberapa bangunan-bangunan peninggalan Belanda beserta data foto yang ada di Majene. Berbeda dengan karya yang dibuat oleh Ridwan, skripsi ini menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi pada tata ruang tradisional menjadi tata ruang kota kolonial Majene.

Buku dengan tema pembahasan yang sesuai dengan penelitian ini juga dituliskan oleh Abdul Rahman Hamid dengan judul buku “Jaringan Maritim

Mandar Studi Tentang Pelabuhan “Kembar” Pambauwang dan Majene di Selat Makassar 1900-1980”. Dalam tulisannya Abdul Rahman Hamid menggambarkan mengenai pelabuhan Majene sebagai pusat perdagangan di Mandar. Oleh karena itu, keberadaan pelabuhan tersebut menjadi salah satu faktor perkembangan infrastruktur kolonial di Majene. Penelitian tersebut juga menyebutkan beberapa bangunan masa kolonial di sekitar Pelabuhan Majene yang dekat dengan pusat pemerintahan kolonial di Majene. Hal tersebut berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu penulis menggambarkan perubahan tata ruang kota yang terjadi di sekitar Pelabuhan Majene dari masa Kerajaan Banggae hingga masa Kolonial Belanda.

Muhammad Amir menulis buku dengan judul “Penataan Mandar Masa Kolonial Belanda 1905-1942”. Ia menuliskan mengenai penataan wilayah Mandar dari segi politik, penataan wilayah, dan pemerintahan. Sementara itu dalam skripsi ini membahas mengenai penataan Kota Kolonial Majene khususnya kawasan pusat pemerintahan dan beberapa infrastruktur kolonial lainnya.

Kemudian Buku “Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat” yang ditulis oleh Edward L. Poelinggomang, menuliskan tentang perjalanan penaklukan Mandar oleh pihak Pemerintah Hindia Belanda. Penaklukan Mandar dapat ditandai dengan penandatanganan *korte verklaring* (perjanjian pendek) yang diperintahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi J.B. van Heutzs<sup>8</sup>. Kemudian, dalam skripsi ini menuliskan juga mengenai penaklukan Mandar, namun lebih spesifik membahas

---

<sup>8</sup> Edward L. Poelinggomang, *Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat*, (Makassar: De La Macca, 2012), hlm. 103.

mengenai Ekspedisi Militer Belanda yang menjadi titik awal perubahan tata ruang kota tradisional di Majene dengan pembangunan tangsi militer.

Selain buku, ada juga beberapa jurnal ilmiah yang menyajikan pembahasan dengan tema sejarah Mandar pada masa kolonial. Di antaranya adalah karya Abdul Karim dengan judul “Ekspedisi Militer Belanda di Mandar 1905-1907”. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai proses penaklukan Mandar melalui Ekspedisi Militer Belanda dan juga perlawanan masyarakat Mandar. Pada skripsi ini membahas mengenai penaklukan wilayah Mandar dan proses Majene menjadi pusat pemerintahan Belanda di *Afdeeling* Mandar.

“Rekonstruksi Mandar : Otoritas Hindia Belanda dan Lahirnya Afdeling Mandar 1905-1942” karya Abdul Karim membahas mengenai sejarah penaklukan wilayah Mandar dan proses berdirinya *Afdeeling* Mandar. Pembahasan tersebut juga disinggung dalam skripsi ini, namun berbeda sudut pandang. Hal ini disebabkan oleh pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada penaklukan Mandar sebagai titik awal perubahan tata ruang kota tradisional Majene menjadi tata ruang kota kolonial.

Jurnal lain yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini dituliskan oleh Ilham Daeng Makkelo dengan judul “Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis”. Dalam jurnal ini Ilham Daennng Makkelo memberikan pengertian mengenai kota kolonial, yaitu kota kolonial ditandai dengan benteng dan barak, perkantoran, rumah-rumah, gedung *societeit*, rumah ibadah<sup>9</sup>. Jurnal ini

---

<sup>9</sup> Ilham Daeng Makkelo, “Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis”, *Lensa Budaya*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2017, hlm. 87.

digunakan sebagai dasar dalam melihat tata ruang kota di *Onderafdeeling* Majene. Karya Ilham Daeng Makkelo ini berbeda dengan skripsi ini terutama dari segi spasialnya dan lebih fokus membahas mengenai perubahan tata ruang kota *Onderafdeeling* Majene.

Selain itu ada beberapa tulisan yang memuat sejarah kota kolonial di Indonesia, walaupun memiliki spasial penelitian yang berbeda. Di antaranya adalah buku “Pengantar Sejarah Kota” ditulis oleh Purnawan Basundoro. Purnawan menjelaskan bahwa kota kolonial adalah kota yang tumbuh berbarengan dengan munculnya kolonialisasi Eropa di negara Dunia Ketiga seperti Asia dan Afrika, kota kolonial juga merupakan kota yang dikembangkan oleh pendatang Eropa di tempat yang mereka datangi<sup>10</sup>. Kota kolonial juga identik dengan adanya pencampuran antara bangsa Eropa dan Bumiputera, baik kebudayaan, pemerintahan, dan pengaruh desain bangunan. Kota kolonial juga memiliki ciri khas pembagian wilayah dalam ruang kota berdasarkan etnis, seperti kawasan orang Eropa, Cina, dan Pribumi. Karya Purnawan Basundoro sesuai dengan tersebut sesuai dengan kondisi tata ruang kota kolonial *Onderafdeeling* Majene. Namun, berbeda dari segi spasial dan skripsi ini fokus pada perubahan tata ruang kota dan pembangunan infrastruktur kota kolonial.

### **1.6.2. Landasan Konseptual**

Definisi kota dari beberapa pakar kota memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain dengan kekuatan argumennya masing-masing. Oleh karena itu, ketika ingin mengkaji mengenai sejarah kota khususnya di Indonesia harus

---

<sup>10</sup> Purnawan Basundoro, *Op.,Cit*, hlm. 68.

memahami berbagai definisi kota dengan cermat. Sehingga, dalam melakukan penelitian dengan tema sejarah kota dapat mengidentifikasi jenis-jenis kota berdasarkan berbagai definisi kota.

Menurut para ahli ekologi perkotaan, kota adalah masalah kependudukan yang terpisah-pisah berdasarkan kemakmuran dan kebudayaan.<sup>11</sup> Sementara itu, menurut Max Weber kota adalah permukiman yang penduduknya lebih mengedepankan kehidupan perdagangan dan komersial dari pada pertanian.<sup>12</sup> Berdasarkan definisi tersebut, kota lahir dari aktifitas ekonomi dan juga kebudayaan penduduk. Ciri kota yang seperti itu mayoritas lahir dan berkembang di daerah pesisir sebagai pintu gerbang utama jalur perdagangan.

Ada juga kota yang lahir di daerah pedalaman yang pusat kotanya berupa keraton. Oleh karena itu, keraton juga salah satu faktor utama dalam pembentukan sebuah kota. Gejala seperti ini sesuai dengan pembentukan kota di Indonesia khususnya kota pada masa pra kolonial.<sup>13</sup> Namun, konsep seperti ini tidak berlaku secara menyeluruh di Indonesia karena tidak semua kota yang lahir berawal dari keberadaan keraton.

Majene adalah salah satu daerah yang lahir dengan tidak memiliki kaitan langsung dengan keberadaan fisik keraton sebagai pusat kota prakolonial. Majene terbentuk dari Kumpulan kampung-kampung yang lahir secara natural berdasarkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ida Liana Tanjung, *Palembang dan Plaju Modernitas dan Dekolonisasi di Perkotaan Sumatera Selatan Abad ke-20*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 8.



kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakatnya. Kemudian dalam perjalanan sejarah Majene pada masa prakolonial berada di bawah kekuasaan Kerajaan Banggae dengan pusat kotanya adalah masjid yang dibangun pada abad ke-17. Kemudian daerah pemukiman penduduk tersebar secara alami di berbagai kampung.

Secara umum kota-kota yang berkembang di Indonesia diawali dengan kota tradisional atau kota yang lahir pada masa prakolonial. Kota tradisional memiliki ciri khas dikelilingi oleh tembok dan parit yang berfungsi sebagai benteng pertahanan. Kemudian pra elit bermukim di dalam benteng tersebut dan masyarakat biasa berada di luar benteng.<sup>14</sup> Setelah kedatangan pemerintah kolonial pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 kota tradisional berkembang menjadi kota kolonial. Kota kolonial memiliki tata ruang yang hampir sama dengan kota tradisional dengan keberadaan benteng dan keraton, namun memiliki perbedaan pada pemanfaatannya yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah kolonial. Selain itu, kota kolonial juga memiliki ciri khas tata ruang dengan berdasarkan pada segregasi ras.

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan.<sup>15</sup> Wujud struktural ruang tersebut berupa pemanfaatan ruang dengan kepentingan tertentu, seperti menggunakan ruang sebagai kawasan ekonomi, pemerintahan, dan permukiman. Pemanfaatan ruang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>15</sup> A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 7.

berdasarkan kepentingan tertentu terlihat secara fisik berupa infrastruktur yang dibangun pada sebuah ruang kota.

Tata ruang kota prakolonial dan kota kolonial memiliki perbedaan pada pembagian segmen kota berdasarkan pada segregasi ras. Hal ini terjadi karena pemerintah kolonial melakukan penataan ruang lebih mengutamakan kepentingan mereka. Ruang dibagi berdasarkan pada segregasi ras yang menempatkan orang Eropa sebagai ras tertinggi dan orang-orang selain mereka memiliki kelas sosial lebih rendah seperti orang pribumi.

Oleh karena itu orang Eropa memiliki kesempatan lebih luas dalam pemanfaatan ruang dibandingkan penduduk lain. Seperti wilayah pusat pemerintahan tidak lagi dikuasai pribumi melainkan orang Eropa. Kemudian permukiman orang Eropa mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan tidak dibiarkan untuk bercampur dengan permukiman penduduk selain orang Eropa. Maka hal tersebutlah yang terlihat jelas mengalami perubahan pada tata ruang kota prakolonial menjadi tata ruang kota kolonial.

## **1.7. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdapat beberapa tahapan penelitian yaitu, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah. Berikut ini uraian mengenai metode yang digunakan oleh penulis.

### **1.7.1. Pengumpulan Sumber**

Setelah memilih topik penelitian sejarah, langkah kedua yang dilakukan adalah melakukan penelusuran sumber berupa arsip atau pun narasumber yang dapat

dipertanggung jawabkan. Pengumpulan sumber berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud berupa laporan asisten residen Mandar pada masa kolonial, penelusuran peta wilayah Majene pada masa kolonial, dan tulisan Belanda yang membahas mengenai penaklukan Mandar dan pembangunan infrastruktur serta perencanaan kota yang diterbitkan pada masa kolonial.

Penelusuran sumber sekunder berupa tulisan atau hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang sama. Hal ini dilakukan demi melihat hal-hal yang penting dan belum dituliskan pada penelitian terdahulu. Sehingga dalam penulisan karya tulis ini memiliki sudut pandang baru dan hal baru dan penting untuk diungkap dalam penelitian sejarah.

Penelusuran sumber di lapangan juga dilakukan, berupa penelusuran letak bangunan kolonial dan juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat. Pertama, melakukan wawancara dengan pemilik rumah yang dulunya sebagai kantor syahbandar di Pelabuhan Majene, tokoh tersebut adalah Prof. Gufran. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas museum Mandar yang menyimpan dokumen seperti peta Majene masa kolonial, yaitu Suriawan. Wawancara juga dilakukan kepada budayawan Mandar, Tammalele yang menjelaskan beberapa informasi mengenai yang ada di wilayah Banggae (Majene).

Jenis-jenis sumber yang digunakan dalam skripsi ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa peta kolonial Majene yang diterbitkan pada tahun 1934 dan peta Majene terbitan tahun 1935 yang bersumber dari koleksi Museum Mandar. Kemudian sumber lain juga berupa *Memorie van Overgave (MVO)* dari asisten residen yang pernah menjabat di *Afdeling* Mandar yang

diperoleh dari Arsip Provinsi Sulawesi Selatan, dan arsip foto kolonial. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Sumber lain juga ditemukan di media *online*, yaitu *KITLV* Universitas Leiden, *Dhelpher*, dan *National Archief*.

### **1.7.2. Kritik Sumber**

Kritik sumber dilakukan untuk melihat apakah sumber yang didapatkan dalam penelitian sejarah ini dapat dipercaya atau tidak. Kritik yang dilakukan berupa kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern merupakan kritik yang dilakukan keaslian fisik dari sumber sejarah, seperti keaslian bahan kertas dokumen atau foto. Kemudian kritik intern merupakan kritik yang dilakukan dalam melihat isi dokumen di mana kita memastikan kebenaran isi informasi yang ada dalam sumber sejarah. Kritik yang dilakukan terhadap sumber yang didapatkan berupa menguji keaslian peta Majene pada masa kolonial dan juga menguji keabsahan sumber lain berupa arsip kolonial.

### **1.7.3. Interpretasi**

Pada bagian interpretasi, penulis akan memasuki bagian menganalisis fakta dari sumber sejarah yang didapatkan kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang rasional. Penarikan kesimpulan dari fakta sejarah yang didapatkan dengan melihat fakta sejarah yang lain sehingga dalam upaya menganalisis itu penulis dapat memaksimalkan objektivitas penulisan sejarah ini. Ketika melakukan interpretasi, maka dapat melahirkan pandangan baru terhadap fakta sejarah. Namun, dapat pula dengan pandangan yang sama dari penelitian sebelumnya dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.

#### **1.7.4. Penulisan Sejarah**

Tahapan akhir dalam metode penelitian sejarah adalah penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan hasil penelitian dengan merangkainya dalam narasi sejarah. Penelitian ini akan berfokus pada penulisan sejarah perubahan tata ruang kota di *Onderafdeeling* Majene, sehingga dalam penulisannya akan menyajikan sumber sejarah yang membahas tentang perkembangan kota Majene pada masa kolonial, kemudian akan dianalisis dan akan dituliskan dalam bentuk narasi sejarah berdasarkan data sejarah dan beberapa literatur penunjang tulisan sejarah. Pada tahapan ini pula penulis menggunakan beberapa pendekatan disiplin ilmu lain demi menunjang penulisan karya ilmiah ini.

## **1.8. Sistematika Penulisan**

Bab I membahas mengenai dasar pikiran penelitian skripsi ini, dalam bab ini penulis membahas wilayah Majene secara umum dan juga memberikan gambaran awal perubahan tata ruang di *Onderafdeeling* Majene. Selain itu, pada bab ini juga terdapat beberapa bagian lain seperti rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai perluasan ekspansi Kolonial Belanda di Majene. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menaklukkan Mandar. Kemudian juga akan dibahas mengenai titik awal perubahan tata ruang kota Majene.

Bab III membahas mengenai perubahan tata ruang kota Majene setelah menjadi Ibu Kota *Afdeeling* Mandar. Bab ini akan membahas mengenai perubahan tata ruang kota tradisional Majene pada masa Kerajaan Banggae menjadi tata ruang kota kolonial.

Bab IV membahas mengenai infrastruktur Kota Kolonial *Onderafdeeling* Majene sebagai Ibu Kota *Afdeeling* Mandar di Majene. Pada bab ini akan membahas mengenai pembangunan infrastruktur kota yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Bab V berisi kesimpulan dan penutup dengan kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah di Bab I.

**BAB II**  
**PERLUASAN EKSPANSI KOLONIAL BELANDA DI MAJENE**  
**TAHUN 1905-1908**

Bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi Majene sebelum masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu pada masa kekuasaan Kerajaan Banggae di Mandar. Pada pembahasan masa pra-kolonial di Majene akan menjelaskan kondisi daerah ini di bawah pemerintahan Kerajaan Banggae, mulai dari kondisi geografis, politik, sosial, dan ekonomi.

Selain itu, dalam bab ini akan menjelaskan tentang kondisi Majene pada masa awal penaklukan Mandar oleh Pemerintah Hindia Belanda. Proses penaklukan Mandar melalui Ekspedisi Militer Belanda pada tahun 1905 akan menjadi inti pembahasan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Majene dijadikan sebagai ibu kota *Afdeeling*<sup>1</sup> Mandar.

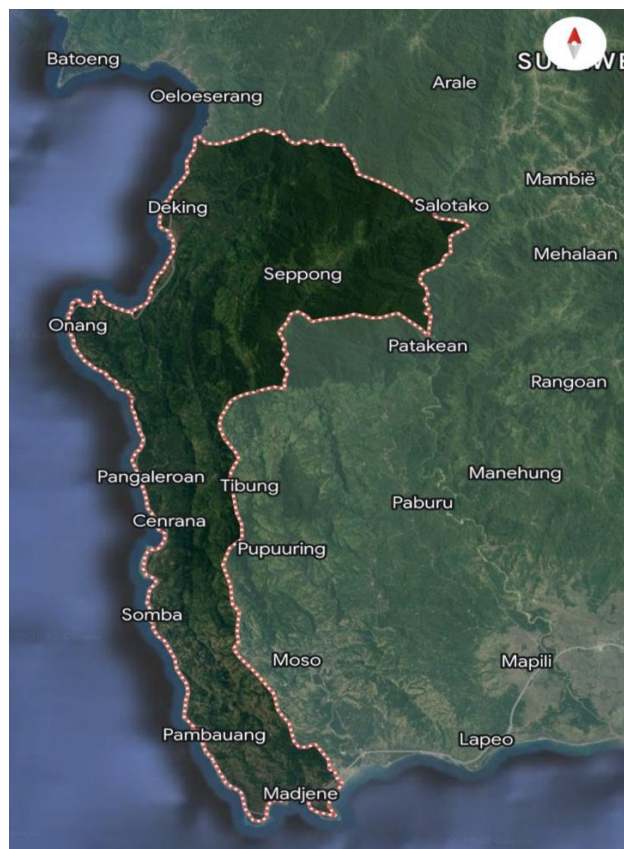
### **2.1. Kondisi Geografis Majene**

Majene adalah sebuah daerah yang berada di pesisir pantai barat Pulau Sulawesi dan berhadapan langsung dengan Teluk Mandar dan Selat Makassar. Secara astronomi Majene terletak diantara 2° , 38' 45"- 3° , 38' 15" Lintang Selatan dan 118° , 45' 00"- 119° , 4' 45" Bujur Timur.<sup>2</sup> Wilayah Majene memanjang dari utara ke selatan *Afdeeling* Mandar atau wilayah Provinsi Sulawesi Barat saat ini.

---

<sup>1</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia Online, arti kata *afdeeling* adalah seksi; bagian; divisi.

Majene merupakan salah satu kabupaten dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Majene berbatasan dengan beberapa daerah, di utara berbatasan dengan Mamuju, di timur berbatasan dengan Polewali Mandar, di selatan berbatasan dengan Teluk Mandar, dan di barat berbatasan dengan Selat Makassar.



**Gambar 2. 1 Peta Majene**

*(Sumber: Google Maps, diakses pada 31 Mei 2023)*

Saat ini, secara administrasi Majene memiliki luas wilayah kurang lebih 947,84 km<sup>2</sup> atau kurang lebih 94.784 Ha. Wilayah Majene terdiri dari 8 daerah kecamatan, yaitu Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana,

---

<sup>2</sup> Syahrir Kila, *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan*, (Makassar: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2001), hlm. 7.



Tammero'do, Tubo, Malunda, dan Ulumanda.<sup>3</sup> Kemudian pusat kota Majene terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Banggae dan Banggae Timur.

Kondisi geografis Majene meliputi daerah dataran rendah yang ada di sepanjang pesisir pantai dan daerah dataran tinggi di pedalaman Majene. Terdapat Sungai Majene yang mengalir dari hulu sungai di pegunungan dan muara sungai di pesisir pantai dekat dengan Pelabuhan Majene. Namun, sungai ini tidak memiliki arti apa-apa untuk pelayaran, karena terdapat banyak beting dan bagian hilirnya sangat pendek disebabkan sering kali berpindah perut sungai itu".<sup>4</sup> Oleh sebab itu sungai Majene tidak digunakan sebagai jalur transportasi untuk menghubungkan antara pelabuhan dan daerah hasil pertanian di pedalaman.

## **2.2. Majene Pada Masa Prakolonial**

Secara umum, Majene telah melalui sejarah panjang kekuasaan pemerintahan mulai dari masa kerajaan, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Pada bagian ini akan membahas mengenai masa pra-kolonial atau masa kekuasaan raja-raja di Kerajaan Banggae. Pembahasan mengenai masa Kerajaan Banggae merupakan hal yang penting untuk melihat sejarah perkembangan Majene pada periode kolonial dan kemerdekaan.

### **2.2.1. Asal Usul Kerajaan Banggae**

Secara geografis letak Kerajaan Banggae persis dengan letak geografis Majene. Hal ini disebabkan wilayah Kerajaan Banggae adalah daerah yang dalam

---

<sup>3</sup> Darmansyah, *Majene Menemukan Hari Jadinya*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015), hlm. 2.

<sup>4</sup> W. J. Leyds, *Memory Asisten Residen W. J. Leyds Selama Bertugas di Mandar*, hlm. 6.

perkembangannya kemudian juga dikenal dengan nama Majene. Kerajaan Banggae merupakan salah satu kerajaan yang tergabung dalam persekutuan *Pitu Ba'bana Binanga*<sup>5</sup> (tujuh kerajaan di pesisir pantai) dengan status sebagai *ana'* (anak) atau anggota.<sup>6</sup>

Sebelum menjadi Kerajaan Banggae, wilayah ini dipimpin oleh kepala kampung masing-masing yang disebut *Tomakaka*. *Tomakaka* adalah sebutan bagi seorang pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat dengan cara mengayomi.<sup>7</sup> Periode *Tomakaka* ini diperkirakan dimulai sejak berakhirnya zaman neolit di Kalumpang (Mamuju), yaitu sekitar abad pertama masehi.<sup>8</sup>

Pada masa kepemimpinan *Tomakaka* di Banggae terdapat 7 *Tomakaka*, yaitu *Tomakaka Poralle*, *Tomakaka Naung Indu'*, *Tomakaka Salogang*, *Tomakaka Lambe'* Susu, *Tomakaka Lambe'* Allu, *Tomakaka Mawasa*, *Tomakaka Totoli*.<sup>9</sup> Masa pemerintahan tujuh *Tomakaka* berlangsung cukup lama, namun tidak diketahui

---

<sup>5</sup> Persekutuan *Pitu Ba'bana Binanga* merupakan persekutuan yang lahir ketika dilaksanakannya perjanjian Tammajarra yang diinisiasi oleh Mara'dia Balanipa I Tomepayung, dengan tujuan mendamaikan tujuh kerajaan Mandar yang berada di muara sungai atau di pesisir pantai.

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan Alimuddin, *Majene Kota Tua Pelestarian dan Potensi Pariwisata*, (Polewali Mandar: Teluk Mandar Kreatif, 2020), hlm. 19.

<sup>7</sup> Darmawan Mas'ud Rahman, *Puang dan Daeng Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar*, (Ujung Pandang : Disertasi Universitas Hasanuddin, 1988), hlm. 171.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 168.

<sup>9</sup> Syahrir Kila, *Op.,cit*, hlm. 26.

berapa generasi *Tomakaka* yang memimpin hingga memasuki masa Kerajaan Banggae.<sup>10</sup>

Lahirnya Kerajaan Banggae dimulai saat hadirnya *Topole-Pole*<sup>11</sup> ke Poralle (Salabose)<sup>12</sup> sekitar abad ke-15 sebelum pelaksanaan Perjanjian *Tammajarra* di Balanipa.<sup>13</sup> Rombongan *Topole-Pole* pertama kali mendarat di daerah kekuasaan *Tomakaka* Mawasa kemudian mendapatkan sambutan baik dari *Tomakaka* Mawasa dan mengizinkannya menetap di sana.<sup>14</sup> Selama menetap di Mawasa, *Topole-Pole* melakukan usaha untuk mendamaikan perselisihan *Tomakaka* Mawasa dengan *Tomakaka* Poralle. Mereka berselisih karena persoalan tanah yang akhirnya bisa didamaikan oleh *Topole-Pole*.

Keberhasil *Topole-pole* dalam menyelesaikan masalah tersebut membuat *Tomakaka* Poralle memberinya tanah tempat tinggal di Bangga-Banggae dan diizinkan menikahi putrinya yang bernama I Merrupa-rupa Bulawang.<sup>15</sup> Pasangan ini melahirkan dua orang anak, yaitu I Salabose Daeng Poralle dan I Banggae. Pada abad ke-15 sejak *Topole-Pole* menempati wilayah Bangga-Banggae, mulailah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>11</sup> *Topole-Pole* (Pendatang) adalah seseorang yang datang dari daerah di luar wilayah Mandar.

<sup>12</sup> Salabose merupakan sebuah daerah yang berada di atas bukit di pesisir pantai Kerajaan Banggae dan sebagai pusat kerajaan.

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan Alimuddin, *op.cit.*, hlm. 20.

<sup>14</sup> Syahrir Kila, *Op. cit.*, hlm. 24.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

istilah Banggae digunakan sebagai nama kerajaan. Topole-Pole kemudian diangkat menjadi Mara'dia (Raja) pertama Kerajaan Banggae.<sup>16</sup>

### 2.2.2. Asal Usul Majene

Pada masa Kerajaan Banggae, istilah Majene belum banyak digunakan untuk menyebut nama daerah ini terutama dikalangan kerajaan-kerajaan yang ada di Mandar. Hal demikian juga terjadi di masyarakat Kerajaan Banggae, mereka tidak menggunakan istilah Majene dalam menyebutkan daerah Kerajaan Banggae. Namun, mengenai asal usul istilah Majene masih menjadi pertanyaan hingga saat ini karena ada beberapa pendapat yang berbeda dalam menjelaskan tentang asal usul istilah Majene.

Pendapat mengenai asal usul lahirnya istilah Majene cukup beragam dengan kekuatan argumen masing-masing. Pertama, argumen yang menjelaskan mengenai asal usul Majene menyebutkan bahwa Majene konon pertama kali digunakan sejak adanya pendatang berkebangsaan Belanda menanyakan nama tempat tersebut. Orang Belanda yang datang ke wilayah Kerajaan Banggae ini bertanya kepada seseorang yang sedang *manje'ne'* (berwudhu). Namun, karena orang yang sedang berwudhu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh pendatang tersebut maka ia memberitahukan apa yang sedang ia lakukan, yaitu berwudhu (*manje'ne'*).<sup>17</sup> Kemudian orang yang berkebangsaan Belanda ini menyimpulkan bahwa nama daerah tersebut adalah Majene.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>17</sup> Darmansyah, *Op.,cit*, hlm. 34.

Pendapat yang kedua dituliskan oleh Darmansyah dalam bukunya yang berjudul *Majene Menemukan Hari Jadinya*. Ia berpandangan bahwa nama Majene bukanlah nama sebuah daerah di Kerajaan Banggae karena tidak ada satu pun nama daerah di Kerajaan Banggae yang menggunakan nama Majene. Darmansyah mengungkapkan bahwa Majene adalah sebuah sifat orang Majene yang bersuci/berwudhu.<sup>18</sup> Pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang pertama, namun pendapat yang kedua ini lebih mengedepankan sifat orang Majene yang suci dengan melakukan wudhu.

Pendapat ketiga, dituliskan oleh Ridwan Alimuddin bahwa asal susul nama Majene berasal dari pelaut Kerajaan Gowa yang berlabuh di daerah Totoli yang menyaksikan upacara penurunan perahu ke laut dan saling menyiram setelah perahu terapung. Orang Makassar menyebut ini dengan istilah “*manjeqne-jeqneq*”, dari sinilah orang-orang di Kerajaan Gowa mengenal nama daerah ini. Selain itu juga disebutkan dalam lontar Kerajaan Gowa “*naungki mai ri Manjeqneq*” yang berarti pergilah engkau ke *Manjeqneq*, oleh Raja Gowa Tomaparissi Kallonna. Perintah ini untuk membantu pelaut Mandar mengusir para bajak laut dari Tidung.<sup>19</sup>

Pendapat yang ketiga memiliki kekuatan sejarah yang kuat dengan adanya bukti tertulis dalam lontar Kerajaan Gowa yang menyebut nama daerah Kerajaan Banggae dengan istilah Majene. Diperkirakan istilah Majene ini mulai digunakan oleh Kerajaan Gowa untuk menyebutkan daerah Kerajaan Banggae sejak adanya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>19</sup> Ridwan Alimuddin, *Op. cit.*, hlm. 4.

hubungan pelayaran dengan Kerajaan Banggae oleh pelaut-pelaut dari Kerajaan Gowa.<sup>20</sup>

Setelah Kerajaan Gowa ditaklukkan oleh Kolonial Belanda dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya (*Het Bongaais Verdrag*) pada 28 Juli 1669,<sup>21</sup> Belanda dalam menyebut daerah Kerajaan Banggae juga menggunakan istilah Majene. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa istilah Majene pertama kali digunakan oleh Kerajaan Gowa untuk menyebut daerah Kerajaan Banggae yang dibawa oleh pelaut-pelaut Kerajaan Gowa yang melakukan pelayaran ke wilayah Kerajaan Banggae. Kemudian istilah Majene terus digunakan hingga masa pemerintahan kolonial di Kerajaan Banggae dan hingga saat ini.

### **2.2.3. Kondisi Masyarakat Kerajaan Banggae**

Manusia pertama yang mendiami wilayah Kerajaan Banggae adalah cucu dari Ibongkapadang yang berasal dari Mambulilling (Mamasa). Dia datang bersama istri dan saudara perempuannya. Kemudian cucu Ibongkapadang yang laki-laki itu menjadi Tomakaka pertama di Salabose, juga dikenal dengan nama Tomakaka Poralle.<sup>22</sup> Keturunan dari Tomakaka Poralle' inilah yang berkembang menjadi penduduk di Kerajaan Banggae.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>21</sup> Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), hlm. 31-30.

<sup>22</sup> Suradi Yasil, *Warisan Salabose Sejarah dan Tradisi Maulid*, (Yogyakarta : Ombak, 2013), hlm. 15.

Kerajaan Banggae yang berada di wilayah Mandar memiliki penduduk mayoritas Suku Mandar. Selain Suku Mandar, ada beberapa suku yang ada di Kerajaan Banggae (Majene) yaitu Suku Bugis, Makassar, dan Toraja. Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan di Majene pada tahun 1930 jumlah orang Mandar 27.986 jiwa, Toraja sebanyak 7 jiwa dan Bugis 106 jiwa serta juga ada 8.169 jiwa penduduk imigran.<sup>23</sup> Keberadaan suku selain Mandar ini disebabkan oleh hubungan pelayaran yang dijalin oleh Kerajaan Banggae dengan beberapa kerajaan di Sulawesi dan juga hubungan perkawinan antar suku.

Masyarakat Suku Mandar khususnya di Kerajaan Banggae adalah masyarakat yang terkenal dengan keahliannya dalam mengarungi lautan. Hal ini didukung oleh letak geografis Kerajaan Banggae yang ada di pesisir pantai barat Sulawesi. Oleh karena itu mayoritas masyarakat Kerajaan Banggae memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan juga pedagang dengan menggunakan kapal-kapal dagang. Selain itu, beberapa daerah di pedalaman masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

Masyarakat Banggae yang mayoritas pelaut bermukim di pesisir pantai dengan rumah-rumah yang dibangun dengan model rumah panggung. Mereka bermukim di daerah pesisir pantai agar mudah mengakses sumber mata pencaharian mereka di laut. Kemudian masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani bermukim di daerah yang dekat dengan kebun dan lahan pertanian mereka. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka menjangkau lahan pertanian.

---

<sup>23</sup> Volkstelling 1930 Deel V, Inheemsche Bevolking van Borneo, Celebes, De Kliene, Soenda Eilanden En De Molukken, (Batavia: Departement van Economische Zaken, 1936), hlm. 29-47.

### **2.3. Majene Pada Masa Kolonial**

Masuknya pengaruh Belanda di Nusantara tidak hanya berdampak pada daerah yang menjadi tujuan penjajahan, seperti Maluku dan Jawa. Namun, juga dirasakan oleh kerajaan yang ada di Sulawesi (Celebes) terutama di Kerajaan Gowa Tallo. Kerajan-kerajaan yang ada di Mandar sebagai kerajaan sekutu Kerajaan Gowa Tallo juga menjadi sasaran dari ekspansi yang dilakukan oleh Kolonial Belanda.

#### **2.3.1. Masuknya Belanda di Kerajaan Banggae**

Penaklukan Kerajan Gowa Tallo pada tahun 1669 dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya menjadi awal penaklukan kerajaa-kerajaan di Sulawesi Selatan. Mandar merupakan daerah yang menjadi salah satu sasaran utama menaklukan Belanda karena kerajaan di Mandar yang diwakili oleh Kerajaan Balanipa tidak menyepakati dan menandatangani isi Perjanjian Bongaya.

Pada tahun 1671 Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palakka melakukan penyerangan ke Kerajaan Banggae.<sup>24</sup> Penyerangan ini dilakukan karena Kerajaan Banggae merupakan salah satu kerajaan di Mandar yang menolak Perjanjian Bongaya. Namun penyerangan tersebut tidak berhasil menaklukkan Kerajaan Banggae.

Belanda kembali mendatangi Kerajaan Banggae pada tahun 1870 dengan mengirimkan tentara dari Makassar. Kedatangan Belanda ini untuk menjemput bangsawan Gowa Daeng Mangawing yang melarikan diri ke Kerajaan Banggae.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Syahrir Kila, *Op. cit.*, hlm. 29.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 29.



Namun, Mara'dia Banggae Puatta Ajuara' tidak menerima maksud kedatangan Belanda tersebut karena bangsawan tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga Kerajaan Banggae. Kerajaan Banggae memilih untuk bersiap menghadapi serangan militer yang sewaktu-waktu akan dilakukan oleh Belanda.

Serangan militer dilakukan oleh Belanda mulai pada tahun 1871 dengan melakukan penyerangan dari laut menggunakan meriam. Kemudian pada tahun 1875 Belanda kembali melakukan penyerangan ke Kerajaan Banggae dan mampu memukul mundur pasukan kerajaan hingga ke pedalaman Kerajaan Banggae. Penyerangan yang terus dilakukan oleh Belanda belum ada yang memberikan hasil yang memuaskan karena wilayah ini belum sepenuhnya dikuasai.

### **2.3.2. Ekspedisi Militer Belanda di Mandar**

Pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan dalam upaya menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Mandar. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda memasukkan Mandar ke dalam daftar daerah operasi militer. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Ekspedisi Militer di Sulawesi Selatan pada tahun 1905-1907. Ekspedisi Militer ini dilancarkan ke beberapa daerah, seperti Bone, Soppeng, Masanrepulu, dan wilayah Mandar.<sup>26</sup>

Ekspedisi Militer Belanda ini merupakan upaya untuk menguasai seluruh wilayah yang ada di Hindia Belanda, terutama kerajaan-kerajaan yang masih berdiri sendiri. Hal ini dilakukan demi melanggengkan kekuasaan Pemerintah Hindia

---

<sup>26</sup> Abdul Karim, Ekspedisi Militer Belanda di Mandar 1905-1907, *Handep, Jurna Sejarah dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 199.

Belanda dan juga untuk kepentingan perekonomian. Selain itu, Ekspedisi Militer Belanda dilakukan demi menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi, sehingga mempermudah Belanda dalam mengontrol daerah yang ada di seluruh wilayah Hindia Belanda.<sup>27</sup>

Ketika dilakukan operasi militer di Mandar pada awal abad ke-XX, suasana politik di Kerajaan Balanipa sebagai representasi kerajaan di Mandar sedang mengalami kekacauan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai wilayah Mandar. Belanda melakukan politik adu domba untuk mengacaukan kondisi internal kerajaan, sehingga dengan mudah untuk melakukan upaya penguasaan Mandar.

Konflik internal kerajaan mulai terjadi antara Mara'dia I Mandawari dan To Kape atau I Baso'. Ketika I Mandawari menjabat sebagai Mara'dia Balanipa, ia melakukan penandatanganan perjanjian pendek (*korteverklaring*) dengan Belanda pada tahun 1870.<sup>28</sup> Namun, penandatanganan tersebut ditolak oleh sepupunya, yaitu To Kape yang merupakan anak dari Mara'dia Balanipa bernama To Mate di Lekopa'dis.

Penolakan yang dilakukan oleh To Kape merupakan bentuk perlawanannya terhadap Pemerintah Hindia Belanda yang berusaha untuk menguasai wilayah Mandar. Perlawanan terus dilakukan oleh To Kape dengan menyerang kapal-kapal Belanda yang berlabuh di pantai barat Sulawesi. Selain itu, To Kape juga menolak

---

<sup>27</sup> Muhammad Amir, *Penataan Mandar Masa Kolonial Belanda 1905-1942*, (Makassar: Arus Timur, 2016), hlm. 42

<sup>28</sup> Abdul Karim, *Op., cit*, hlm. 198.

kedatangan *Gubernemen Celebes* dan berusaha untuk menggantikan I Mandawari sebagai Mara'dia Balanipa. Usaha To Kape kemudian membuahkan hasil pada tahun 1872 ia menggantikan I Mandawari dengan dukungan dari Hadat Mandar.<sup>29</sup>

Kekalahan yang dialami oleh I Mandawari membuatnya pindah ke Makassar untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Hindia Belanda di Fort Rotterdam Makassar. Belanda tidak mengakui kepemimpinan dari Mara'dia To Kape dan masih menganggap I Mandawari sebagai Mara'dia Balanipa. Akibat dari peristiwa ini, Belanda melakukan operasi militer ke Mandar dengan sasaran utamanya adalah Kerajaan Balanipa untuk menurunkan To Kape dari jabatannya sebagai Mara'dia (Raja).

Kedatangan Tentara Belanda ke Mandar berhasil menurunkan To Kape dari tahtanya sebagai Mara'dia Balanipa. Belanda kemudian mengangkat kembali I Mandawari sebagai Mara'dia dan mengasingkan To Tokape ke Pacitan pada tahun 1873.<sup>30</sup> Kembalinya I Mandawari sebagai Mara'dia Balanipa memperkuat posisi Belanda di Mandar khususnya di Kerajaan Balanipa.

Pengakuan pemerintahan Belanda oleh I Mandawari mendorong Pemerintah Hindia Belanda untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Mandar. Upaya-upaya penguasaan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda mendapatkan perlawanan dari beberapa kerajaan di Mandar. Sehingga Belanda memutuskan untuk melakukan Ekspedisi Militer Belanda gelombang pertama ke

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 199

Mandar pada tanggal 22 November 1905 dengan mendarat di Campalagian di bawah pimpinan Letnan Gusdorf.<sup>31</sup>

### **2.3.3. Penaklukan Mandar**

Ekspedisi Militer Belanda sejak tahun 1905 terus mendapatkan perlawanan dari para pejuang Mandar. Seperti perlawanan yang dilakukan di Majene (Banggae) oleh pasukan yang dipimpin oleh Ammana I Wewang dan Ammana I Pattolawali. Satu tahun setelah Belanda masuk ke Majene terjadi penyerangan ke tangsi militer Belanda yang berada di Majene sebagai pusat komando militer. Peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada tanggal 6-7 Juni 1906 setelah pasukan Belanda kembali ke Makassar. Kantor administrasi Pemerintah Hindia Belanda di Majene digerebek oleh gerombolan sejumlah 150 orang, mereka membakar rumah kontrolir dan syahbandar.<sup>32</sup>

Penyerangan ke pusat pemerintahan Kolonial Belanda di Majene dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menolak keberadaan dan penguasaan Belanda. Masyarakat yang melakukan penyerangan tersebut diantaranya berasal dari Allu, Balanipa, dan Majene. Peristiwa penyerangan ini dilakukan pada masa pemerintahan Kontrolir Ketting Oliver yang memaksa ia harus menyelamatkan diri ke Pare-Pare dengan menggunakan perahu “semang” (perahu bersayap). Namun, salah seorang pegawai Belanda berhasil ditawan bernama Schmidthamer yang dibunuh di pedalaman dan banyak uang serta senjata disita oleh pejuang Mandar.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 200

<sup>32</sup> Indisch Militair Tijdschrift, *De Expeditie Naar Zuid-Celebes in 1905-1906, Derde Gedeelte*, (G.Kolff & Co, Batavia Weltevreden, 1916), hlm. 374-375.

Kabar penyerangan yang dilakukan masyarakat Mandar di pusat pemerintahan Belanda di Majene sampai ke telinga Gubernur Sulawesi. Pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Makassar mengirimkan bantuan ke Majene berupa pasukan militer yang berjumlah 1 perwira dan 100 anggota. Pasukan ini dikirim ke Majene pada tanggal 10 Juni 1906 dan tiba pada 11 Juni 1906 di Majene.<sup>34</sup> Mereka melakukan patroli wilayah untuk menumpas kelompok masyarakat di Majene yang melakukan penyerangan ke kantor administrasi Kolonial Belanda.

Bantuan pasukan dari Makassar ke Majene dipimpin oleh Kapten Lenshoek dan Asisten residen Vermeulen dan Pengawas Mandar ikut bersama mereka. Pada saat rombongan ini sampai di Pelabuhan Majene, mereka langsung melakukan penyisiran dengan berpatroli di daerah sekitar Majene.<sup>35</sup> Namun, pasukan bantuan ini tidak menemukan kelompok penyerangan yang mereka targetkan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk kembali dan menyusun rencana selanjutnya demi ditangkapnya pelaku penyerangan tersebut.

Melihat situasi yang mencekam di Majene dan Mandar secara umum, Pemerintah Hindia Belanda yang ada di Makassar memberikan perhatian yang besar. Namun, pada saat penanganan kasus penyerangan ke kantor administrasi Belanda di Majene Gubernur Kroesen mengundurkan diri pada 3 September 1906. Gubernur Kroesen digantikan oleh H.N.A. Swort sebagai gubernur sipil dan

---

<sup>33</sup> W. J. Leyds, *Memori Asisten Residen W. J. Leyds Selama Bertugas di Mandar*, (Makassar, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2013), hlm. 42.

<sup>34</sup> *Indisch Militair Tijdschrift*, hlm. 375.

militer.<sup>36</sup> Operasi militer di Majene terus dilakukan dan juga memberikan rumah kepada orang yang dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda agar tercipta ketentraman.

Pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengetahui bahwa pimpinan pelaku penyerangan ke kantor pusat pemerintahan Kolonial Belanda di Majene adalah I Calo Ammana Wewang dan Ammana I Pattolawali. Belanda kemudian melakukan upaya penangkapan pejuang Mandar tersebut dengan terus melakukan pengejaran dan penggalian informasi mengenai pimpinan kelompok penyerangan tersebut. Pertempuran benar-benar terjadi ketika pasukan Belanda memasuki wilayah benteng di Adolang (Pamboang) pada tanggal 26 Juni 1906. Ammana I Pattolawali melakukan perlawanan kepada pasukan Belanda, sehingga tentara Belanda kewalahan menghadapinya. Ditambah lagi karena Ammana I Pattolawali kebal senjata sehingga menyulitkan pasukan tentara Belanda yang melakukan penyerangan ke Benteng Adolang.<sup>37</sup>

Peperangan ini memaksa pasukan yang dipimpin oleh I Calo Ammana I Wewang untuk mengakui keunggulan pasukan Belanda dan bertahan di Benteng Galung Adolang pada tanggal 26 Juni 1906. Pada peristiwa ini mengakibatkan 5 pasukan Belanda luka, sedangkan pasukan Mandar meninggal sebanyak 17 orang termasuk I Ammana Pattolawali.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Hendrik Muller, *Pokitiiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen*, (Batavia, Landsdrukkerij, 1909), hlm. 120.

<sup>37</sup> Ahmad Asdy, *Detik-detik Berkibarnya Bendera Merah Putih di Mandar*, (Yayasan Mahaputra Mandar, 2017), hlm. 13.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Setelah melalui peperangan dan pencarian yang panjang oleh pihak Pemerintah Hindia Belanda di Majene, perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Mandar dapat dihentikan. Perlawanan ini dapat dihentikan ketika Militer Belanda berhasil menangkap pimpinan pasukan Mandar (I Calo Ammana I Wewang). Penangkapan ini dilakukan di benteng pertahanannya di Adolang pada November 1907 dan diasingkan ke Tanjung Pandang, Belitung sesuai SK. Gubernemen No. 15 tanggal 12 Maret 1908.<sup>39</sup>

Penangkapan I Calo Ammana I Wewang pada pertempuran di Adolang menjadi penanda bahwa perlawanan pejuang Mandar sudah tidak ada lagi. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya berkuasa secara penuh di Mandar. Setelah itu, pemerintah Hindia Belanda melakukan upay-upaya untuk mengamankan kondisi perpolitikan di Mandar.

---

<sup>39</sup> Abd. Karim, *Op.cit.*, hlm. 57.